

Kebijakan rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun di Indonesia repelita periode 1969 1998 dan di Korea Selatan Five Year Economic development plan fyedp periode 1962 1996 = Five year Economic Development plan in Indonesia Repelita period of 1969 1998 and in South Korea fyedp period of 1962-1996

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402616&lokasi=lokal>

Abstrak

[Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan dan permasalahan yang timbul dari kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun di Indonesia dan di Korea Selatan dalam upayanya membangun perekonomian periode 1969-1998 untuk Indonesia dan periode 1962-1996 untuk Korea Selatan. Dengan metode kualitatif melalui teknik studi literatur, penelitian ini berusaha membandingkan kedua kebijakan dan menggambarkan letak perbedaan serta permasalahan yang timbul sehingga hasil dari kebijakan tersebut berbeda di kedua negara. Hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan arah pembangunan antara kebijakan yang dijalankan di Indonesia dan Korea Selatan terkait dengan hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan pengusaha serta perubahan sistem politiknya. Studi ini berkesimpulan bahwa dengan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi seperti di Korea Selatan yang mengikutsertakan partisipasi dari pemerintah, masyarakat hingga kelompok bisnis mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih baik dibandingkan Indonesia., This study is about the process of implementation the Five-Year Economic Development Plan in Indonesia and South Korea in order to increase their economies during the period of 1969-1998 for Indonesia and 1962-1996 for South Korea. With qualitative method through literature studies, this study compared different problems and results in both countries based on their policies. The analysis of this study show the differences of the development direction between the two countries based on the relations between the government and businessman, and the influence of their political system. This study concludes that the implementation of the economic development policies in South Korea which included the participation of government, citizens and business groups can provide a better result than the implementation in Indonesia.]